

DINAS KESEHATAN

2024

LAPORAN KINERJA (LKj)



<https://dinkes.pesisirs selatan Kab.go.id>



dinkespessel



DINAS KESEHATAN_PESSEL



Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Painan, 26 Februari 2025
Inspektur,

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

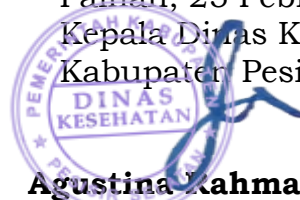
Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT, karena izin dan hidayahNya Laporan Kinerja (LKJ) OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 telah dapat diselesaikan dan disusun. Penyusunan LKJ ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pertanggungjawaban (akuntabilitas) disamping beberapa keberhasilan serta kegagalan dan permasalahan dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya.

Selain itu, penyusunan LKJ juga bertujuan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya bidang kesehatan dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan guna peningkatan kualitas laporan ini.

Painan, 25 Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Kahmadani, S.ST.MM
NIP. 19790810 200312 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan 3 Sasaran Strategis dan 5 indikator Kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

- 1. Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan**
- 2. MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan memiliki capaian diatas 100% . Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan						
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat						
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Kesehatan		A(87)	A(89,68)	103,08
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	2 Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100.000 KH	135	125	107,41
		3 Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	11	10	109,09
		4 Prevalensi Stunting (EPPGBM)		7,00%	6,56%	106,29
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	%	100	91	91,00
Rata-rata capaian Indikator 3 Sasaran Strategis : 5 Indikator Kinerja						103,37

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA	8
1.5 LANDASAN HUKUM	9
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	13
2.1 Rencana Strategis Dinas Kesehatan	13
2.2 Rencana Kinerja	15
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA	19
3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA	20
3.3 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	21
3.4 Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan juga merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, laporan Kinerja Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan Kinerja Dinas Kesehatan adalah untuk memberikan gambaran Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawaban serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian atau target sasaran tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 bagi upaya- upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan
 - 2.3 Kelompok Fungsional Perencana
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 3.1 Kelompok Fungsional
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 4.1 Kelompok Fungsional
5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 5.1 Kelompok Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 6.1 Kelompok Fungsional
7. UPTD

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 2.587 orang yang terdiri atas:

1. PNS sebanyak 879 orang yang terdiri atas 90 orang laki-laki dan 789 orang Perempuan;
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 732 orang yang terdiri atas 94 orang laki-laki dan 638 orang perempuan; dan
3. Non PNS sebanyak 978 orang yang terdiri atas 181 orang laki-laki dan 797 orang perempuan.

Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 berikut :

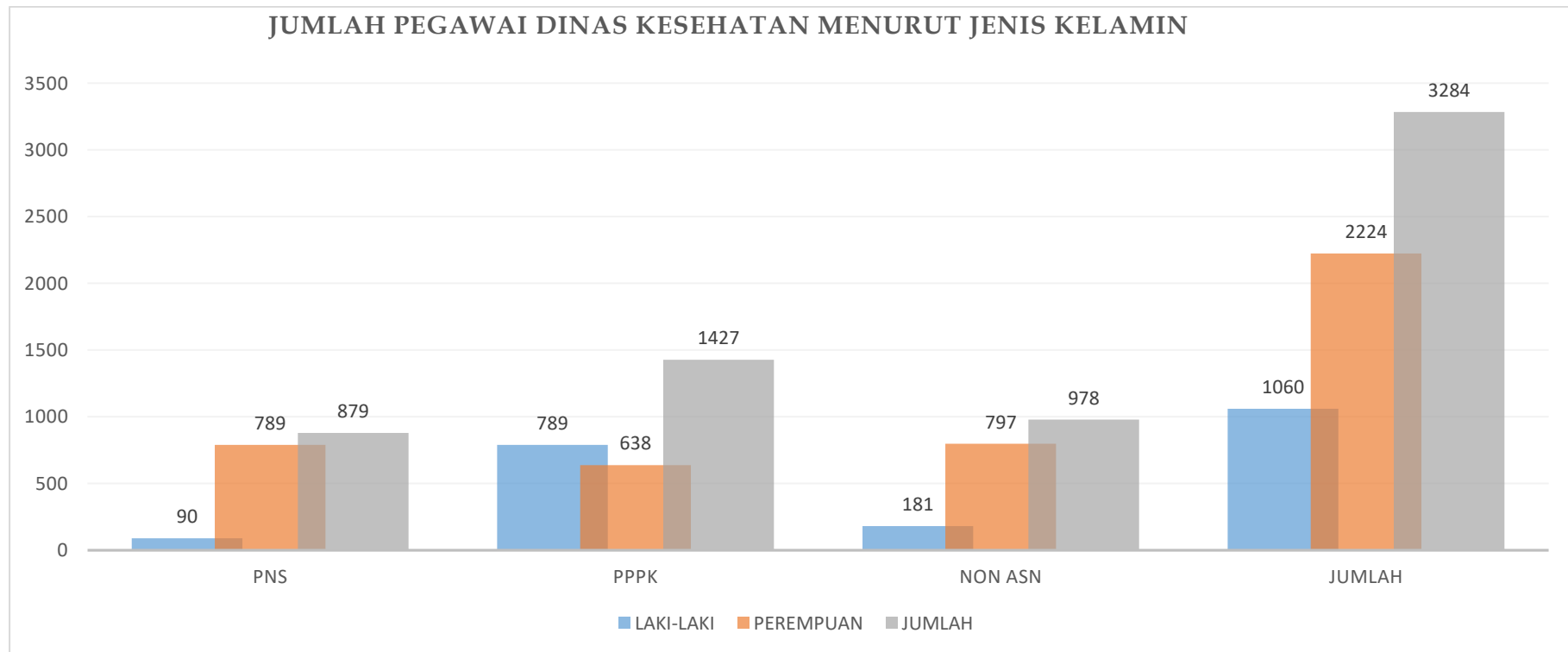
Tabel 1.1

Komposisi jumlah Aparatur Dinas Kesehatan Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin

TAHUN	No	INSTANSI	ASN						NON ASN			TOTAL
			PNS			PPPK			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH				
2024	1	DINAS KESEHATAN	16	51	67	3	15	18	17	20	37	122
	2	BBB	2	28	30	2	35	37	4	17	21	88
	3	TARUSAN	1	36	37	5	33	38	7	14	21	96
	4	ASAM KUMBANG	2	17	19	3	31	34	3	17	20	73
	5	KOTO BERAPAK	4	24	28	2	24	26	5	26	31	85
	6	PASAR BARU	2	47	49	3	20	23	6	21	27	98
	7	SALIDO	2	60	62	3	21	24	4	20	24	110
	8	LUMPO	1	20	21	3	21	24	2	24	26	71
	9	PASAR KUOK	3	30	33	4	27	31	2	13	15	79
	10	IV KOMU	1	15	16	3	25	28	4	21	25	69
	11	SURANTIH	2	56	58	5	34	39	16	81	97	194
	12	KAYU GADANG	1	26	27	5	32	37	8	44	52	116
	13	KAMBANG	10	62	72	1	25	26	9	55	64	162
	14	KOTO BARU	6	38	44	3	21	24	6	37	43	111
	15	BALAI SELASA	5	57	62	4	27	31	4	23	27	120
	16	AIR HAJI	6	56	62	4	20	24	5	50	55	141
	17	INDERAPURA	5	35	40	3	27	30	8	29	37	107
	18	AIRPURA	2	18	20	4	29	33	2	26	28	81
	19	TAPAN	2	19	21	3	28	31	7	19	26	78
	20	RAHUL	3	9	12	3	32	35	6	33	39	86
	21	TANJUNG BERINGIN	3	29	32	4	20	24	3	31	34	90
	22	TANJUNG MAKMUR	3	21	24	4	26	30	5	25	30	84
	23	RSUD TAPAN	8	35	43	20	65	85	48	151	199	326
		TOTAL	90	789	879	94	638	732	181	797	978	2587

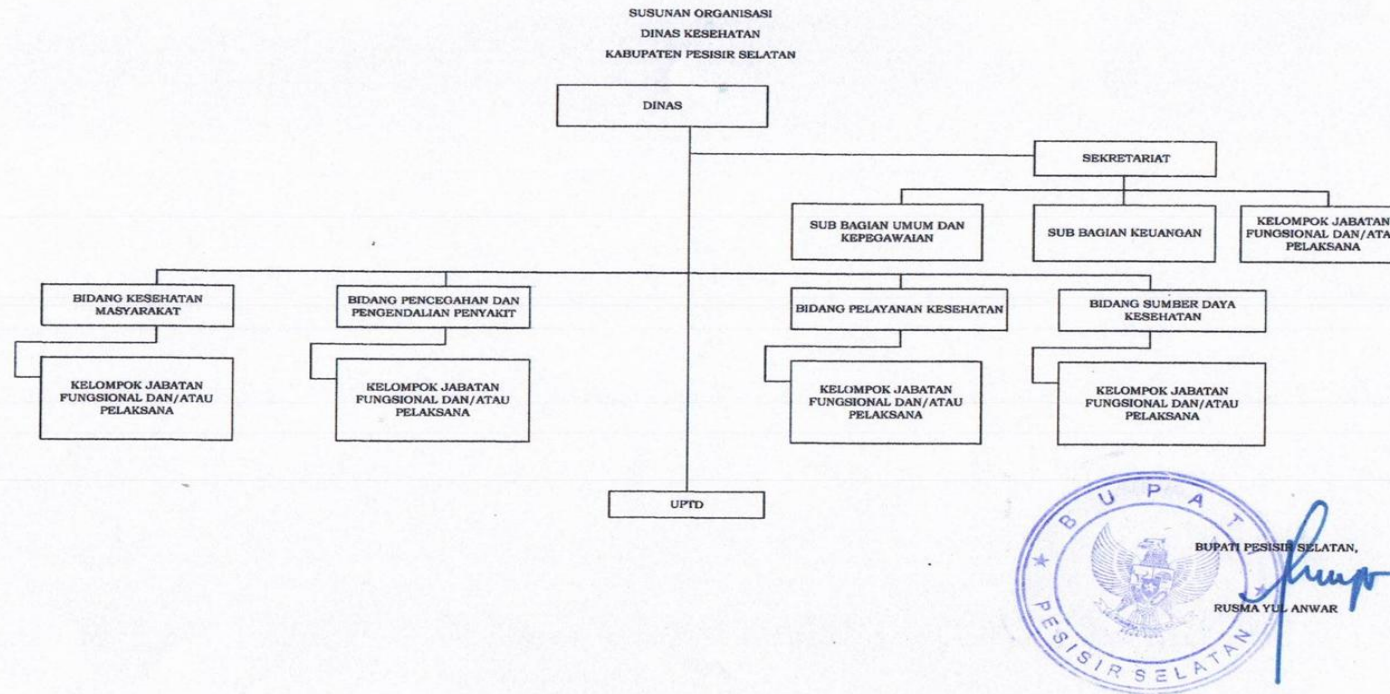
Sumber: bagian umum dan kepegawaian dinas kesehatan

Grafik 1.1



Sumber: bagian umum dan kepegawaian dinas kesehatan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2024, Aspek Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Permasalahan Utama (Strategis Issue) yang sedang dihadapi Dinas Kesehatan pada tahun 2024 :

1. Masih adanya kematian ibu/maternal dan kematian bayi/neonatal yang berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat
2. Masih adanya balita dengan status gizi kurang dan stunting.
3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.
4. Masih rendahnya kualitas dan akses sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat.
5. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
6. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
7. Belum optimalnya sumber daya kesehatan.
8. Belum optimalnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat berbasis individu, keluarga risti dan kelompok masyarakat resiko tinggi terhadap masalah kesehatan.

9. Belum optimalnya dukungan manajemen Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan.
10. Belum optimalnya kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas.
11. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan kurang memenuhi standard.
12. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
13. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Belum maksimalnya kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.
15. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.

1.5 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 10 ndi, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 s/d 2026.
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan laporan kinerja/LAKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Langkah Perbaikan

Memuat langkah perbaikan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

2.1 Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021- 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat kebutuhan

MAJU : dalam memenuhi Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

BERMARTABAT : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

AKUNTABEL : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

PROFESIONAL : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Kedua berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan; dan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Umur harapan Hidup	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Kesehatan	A	A(86)	A(86)	A(87)	A(90)	A
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	(Jumlah Kematian ibu/Jumlah Kelahiran hidup)*100.000	100/100.000KH	145/100.000 KH	140/100.000 KH	135/100.000 KH	130/100.000 KH	125/100.000 KH
				Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah Kematian bayi/jumlah kelahiran hidup)*1.000	8/1.000KH	8/1.000KH	12/1.000 KH	11/1.000 KH	11/1.000 KH	10/1.000 KH
				Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	11,60%	10,92%	11,20%	10,60%	10,60%	9,40%
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Rencana Kinerja

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, merupakan Tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Tanpa Satuan	A (87)
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	%	100
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	130
			Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	11
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	7

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Penghitungan	Program
1		3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu/jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi/jumlah kelahiran hidup dikali 1,000	
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	jumlah anak stunting dibagi jumlah balita yang ditimbang dan diukur dikali 100	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2024.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan surat Sekda nomor :050/1132.Bapedalitbang/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, yang menginformasikan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa :

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan kepada Seluruh Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan catatan hasil evaluasi dan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan Reformasi Birokrasi Tematik;

3. Seluruh Perangkat Daerah tetap memberikan kontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (PK) tahun 2024 yang terdiri dari IKU tahun 2024 dan sasaran strategis lainnya.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	A (87)
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	135/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	11/1.000 KH
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	7,00%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut. Untuk analisa atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, jika angka :

- Persentase pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator ($\text{Realisasi/Target} \times 100\%$) untuk capaian lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik dan /atau
- $[(2 \times \text{target-realisasi}) / \text{Target} \times 100]$ untuk capaian lebih kecil menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel : Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Eselon II
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
MISI 1 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan						
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat						
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Kesehatan		A(87)	A(89,68)	103,08
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	2 Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100.000 KH	135	125	107,41
		3 Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	11	10	109,09
		4 Prevalensi Stunting (EPPGBM)		7,00%	6,56%	106,29
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	%	100	91	91,00
Rata-rata capaian Indikator 3 Sasaran Strategis : 5 Indikator Kinerja						103,37


Dari tabel di atas dapat dilihat, ada 5 (lima) indikator kinerja yang diteapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dengan target A(87).
Capaian untuk indikator ini adalah A (89,68) atau dengan capaian 103,08% dengan prediket **Sangat Baik**. Nilai AKIP ini menggunakan nilai Evaluasi tahun 2023 dikarenakan nilai AKIP Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan Kinerja Tahun 2024 yang dinilai oleh Tim Inspektorat pada bulan Maret 2025.
2. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target 135/100.000 Kelahiran Hidup (KH). Capaian Indikator ini adalah 125/100.000 KH dengan capaian 107,41%, dengan prediket **Sangat Baik**. Untuk indikator ini semakin menurun semakin bagus kinerja.

3. Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 11/1.000 Kelahiran Hidup(KH)
Capaian Indikator ini adalah 10/1.000 KH ATAU 109,09 % dengan prediket **Sangat Baik**.
4. Prevalensi Stunting dengan target 7 %.
Capaian Indikator ini adalah 6,56 % atau 106,29 % dengan prediket **Sangat Baik**.
5. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan dengan target 100 %.
Capaian Indikator kinerja ini adalah 91 % dengan prediket **Sangat Baik**.
Capaian Rata-rata seluruh Indikator Kinerja yaitu 5 (lima) indikator adalah 103,37 % dengan prediket **Sangat Baik**.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Sasaran strategis yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

	<p><u>Sasaran Strategis 1</u></p> <p><u>Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja</u></p>
---	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan**.

a. Membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun 2024

Capaian untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 3.3.1 di bawah ini :

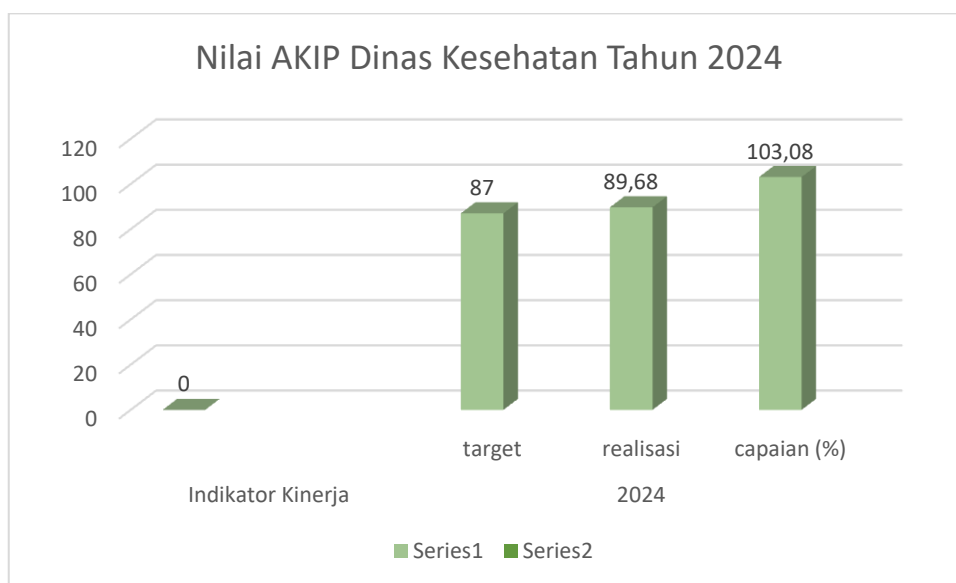
Tabel 3.3.1
 Nilai AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	2024		
	target	realisasi	capaian (%)
Nilai AKIP Dinas Kesehatan	87	89,68	103,08

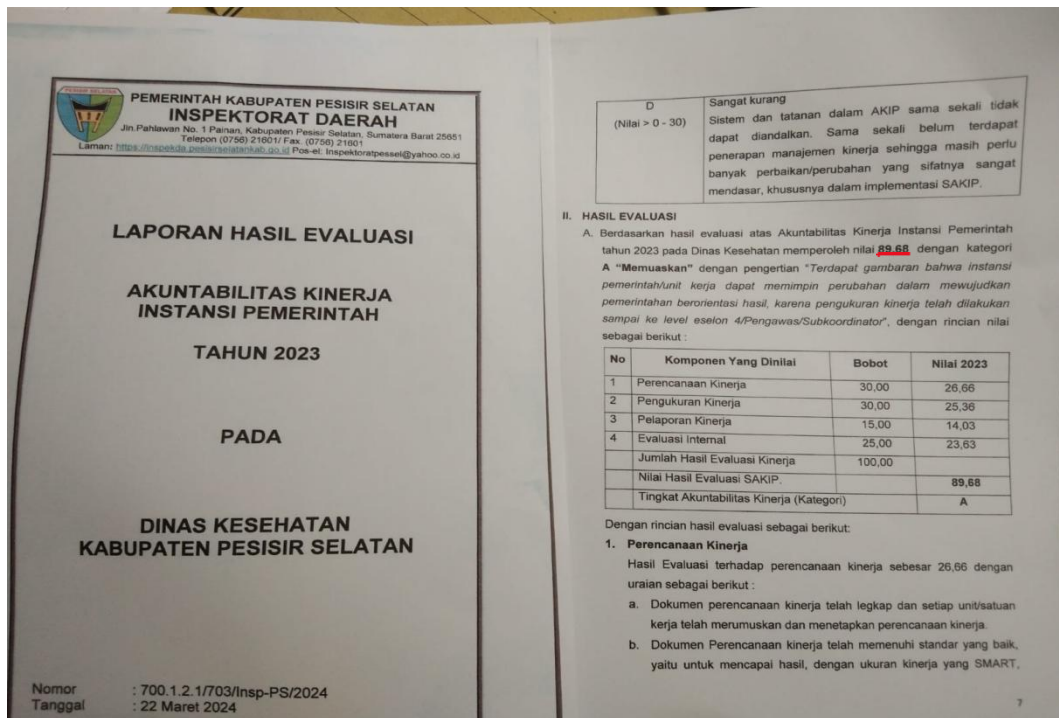
Indikator Kinerja ini memiliki target bernilai A (87), diakhir tahun 2024 Realisasi Kinerja sebesar A(89,68) atau predikat **Memuaskan** dengan capaian untuk indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 103,08 %. Nilai ini berarti termasuk dalam kriteria **Berhasil**.

Capaian indikator kinerja nilai AKIP Dinas Kesehatan dapat di lihat pada grafik 3.1 di bawah ini :

Grafik 3.1



Nilai AKIP di atas didapatkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Dinas Kesehatan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan nomor 700.1.2.1/703/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024.



Sumber : LHE Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan

b) **Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Dari Tahun 2022, realisasi indikator ini terjadi peningkatan Nilai AKIP Dinas Kesehatan yaitu A (86). Pada Tahun 2023 realisasi Nilai AKIP adalah terjadi peningkatan sebanyak 0,16 point, yaitu dari 86,00 menjadi 86,16 sedangkan untuk realisasi tahun 2024 yang merupakan penilaian terhadap Laporan Kinerja tahun 2023 angkanya meningkat 3,73 poin yaitu 89,68. Hal ini menggambarkan bahwa penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan dan kinerja dari Dinas Kesehatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penilaian oleh Tin Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.3
 Nilai AKIP Dinas Kesehatan tahun 2022 s/d 2024

Nilai AKIP Dinas kesehatan	Realisasi		
	2022	2023	2024
Realisasi	86	86,16	89,68
Capaian	100	100,19	103,08

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.3.2. di bawah ini :

Tabel 3.3.2
Perbandingan realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	2024	
	Realisasi Kinerja	Target Renstra
Nilai AKIP Dinas Kesehatan	A	A

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja untuk Nilai AKIP tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra sama yaitu A yang berarti bahwa target Renstra dapat direalisasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan. Dalam perjanjian Kinerja nilai realisasi A adalah 89,68, sementara dalam renstra adalah sama yaitu A, namun untuk angkanya tidak bisa dibandingkan karena dalam Renstra tidak tertulis angka untuk target hanya huruf A saja.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Untuk indikator kinerja nilai AKIP tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dinas kesehatan dengan nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja

Capaian indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan jika dikategorikan termasuk “Sangat Baik”. Tahun 2024, target Perjanjian Kinerja (PK) untuk Nilai AKIP Dinas Kesehatan adalah A (87). Nilai AKIP didapat berdasarkan penilaian oleh Inspektorat atas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023. Nilai yang diberikan oleh Inspektorat adalah A (89,68) dengan prediket Sangat Baik. Adapun keberhasilan dari

peningkatan nilai AKIP Dinas Kesehatan disebabkan berdasarkan Laporan kinerja yang disusun oleh Dinas Kesehatan sudah menggambarkan peningkatan pencapaian kinerja yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Untuk pencapaian indikator kinerja ini, anggaran yang disediakan Rp. 557.536.730,- dan realisasi Rp. 485.675.643,- (87,11%). Sementara capaian kinerja untuk indikator ini adalah 103,08 %. Berdasarkan rumus efisiensi penggunaan sumber daya, maka terdapat efisiensi sebesar 15,49%.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Sumber: PMK No.214/PKK.02/2017

g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Dengan total anggaran Rp. 557.536.730,- dan realisasi Rp. 485.675.643,- (87,11%). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.71.861.087,- atau 12,89 %.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat
-----------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah : banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematian ibu adalah; komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas; penyakit yang memperberat kehamilan, pre eklamsia atau eklamsia, perdarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan dan aborsi yang tidak aman.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu adalah rendahnya cakupan layanan pemeriksaan kehamilan, rendahnya cakupan layanan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan BMHP yang kurang memadai, serta faktor sosial budaya seperti pola pemikiran, keyakinan, pola hidup yang berbeda-beda. Untuk mengurangi angka kematian ibu maka pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan ibu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 40 Disebutkan Jika Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu, membentuk anak yang sehat, cerdas dan berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan upaya-upaya preventif berupa peningkatan cakupan layanan pemeriksaan kehamilan dengan mendekatkan akses ibu hamil terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan cakupan layanan fasilitas kesehatan, peningkatan ketersediaan

obat dan BMHP, serta peningkatan edukasi dan promosi kesehatan terkait pengendalian faktor sosial budaya seperti pola pemikiran, keyakinan, pola hidup yang berbeda-beda.

$$\text{Formula} = \text{AKI} = \frac{\text{JKI}}{\text{JLH}} \times 100.000$$

AKI = Angka Kematian Ibu

JKI = Jumlah Kematian Ibu

JLH = Jumlah Kelahiran Hidup

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabel 3.3.4 berikut ini :

Tabel 3.3.4
Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per-Puskesmas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2	3	4	8
1	Silaut	Tanjung Makmur	231	0
2	Lunang	Tanjung Beringin	374	0
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	223	0
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Ranah IV Hulu	309	0
5	Pancung Soal	Inderapura	366	0
6	Airpura	Airpura	278	0
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	750	2
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	395	0
9	Lengayang	Kambang	589	1
		Koto Baru	245	0
10	Sutera	Kayu Gadang	280	0
		Surantih	630	0
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	287	0
		IV Koto Mudik	146	0
12	IV Jurai	Salido	468	0
		Lumpo	175	0
13	Bayang	Pasar Baru	347	1
		Koto Berapak	259	3
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	96	0
15	Koto XI Tarusan	Tarusan	437	1
		BB. Belantai	302	1
JUMLAH (KAB/KOTA)			7.187	9
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)				125
<i>Sumber: Badan Pusat Statistik</i>				

Dari tabel jumlah kematian ibu yang ada di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2024

sebanyak 9 orang, terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.

Kasus Kematian Ibu disebabkan :

- a. pendarahan sebanyak 1 (satu) orang,
- b. 4 (empat) orang disebabkan oleh Hipertensi dalam Kehamilan, serta
- c. 1 (satu) orang disebabkan karena kelainan jantung dan pembuluh darah
- d. penyebab lain-lain 3 (tiga) orang.
- e. Disamping adanya kasus pendarahan, hipertensi, gangguan sistem peredaran darah, sirosis hepatitis dan Infeksi paru dan penyebab lainnya, AKI pada umumnya disebabkan fasilitas kesehatan yang belum menyeluruh.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pada tahun 2024, target Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 135/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dengan realisasi kinerja adalah 125/100.000 KH, ini berarti bahwa Dinas Kesehatan sudah berhasil menekan angka kematian ibu karena realisasinya di bawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini juga menunjukkan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada indikator Angka Kematian ibu (AKI)

Target dan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.5

Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024					
..					
No	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	135	125	107,41%

Selain dengan tabel, indikator Angka Kematian Ibu dapat juga digambarkan pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3



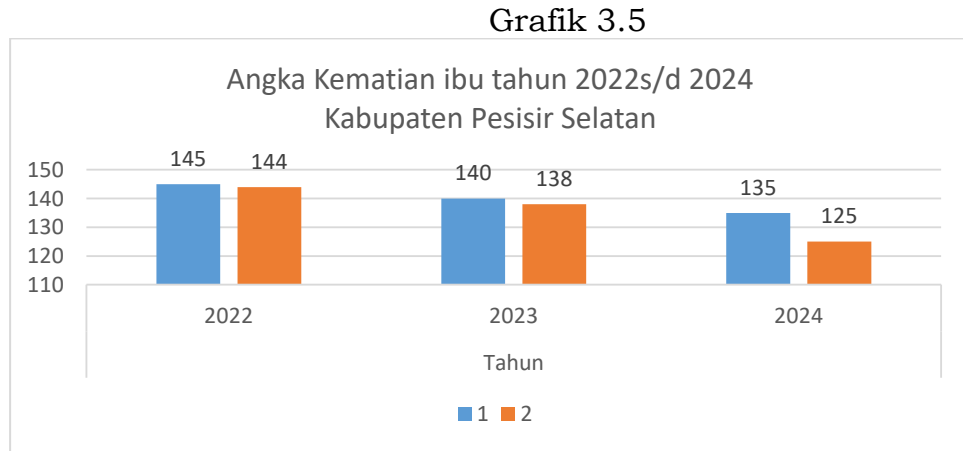
- b. **Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut bahwa realisasi Angka Kematian Ibu dari tahun 2022 ke tahun 2024 terjadi penurunan yaitu dari 144/100.000 KH pada tahun 2022 turun menjadi 138/100.000 KH pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 turun menjadi 125/100.000 KH dari 7.973 orang Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Pesisir Selatan ini berada dibawah Target AKI RPJMN Tahun 2024 yakni 183/100.000 KH . Perbandingan Angka Kematian Ibu dari Tahun 2022 s/d 2024 dapat di lihat pada tabel 3.3.6 di bawah ini :

Tabel 3.3.6
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022 s/d 2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Target	145/100.000 KH	140/100.000 KH	135/100.000 KH
2	Realisasi	144/100.000 KH	138/100.000 KH	125/100.000/KH
3	Capaian	100,69	101,43	107,41

Perbandingan Angka Kematian Ibu diatas dapat dilihat pada grafik berikut :



Begitu juga jika dilihat dari jumlah ibu yang meninggal terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 12 orang pada tahun 2022 menjadi 11 orang pada tahun 2023 dan berkurang menjadi 9 orang pada tahun 2024.

Hal tersebut di lihat pada tabel 3.3.7 di bawah ini :

Tabel 3.3.7
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022 s/d 2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	JUMLAH KEMATIAN IBU	12	11	9

Untuk jumlah kematian ibu tahun 2022 s/d 20024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5



c. Membandingkan Antara Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2024

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target realisasi Renstra dapat dilihat pada tabel 3.3.5. di bawah ini :

Tabel 3.3.5

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra tahun 2024

Indikator Kinerja	2024	
	Realisasi Kinerja	Target Renstra
Angka Kematian Ibu (AKI)	125/100.000 KH	135/100.000 KH

No	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	140	138	101,43%

Formulasi capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)

$$\frac{(2 \times \text{Target AKI} - \text{realisasi})}{\text{Target AKI}} \times 100$$

Capaian indikator AKI masuk dalam kategori “**berhasil**”. karena target dari indikator ini adalah penurunan angka kematian ibu. Untuk Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI), terjadi penurunan jumlah kematian ibu dari tahun 2023 yaitu dari 11 orang ibu yang mati menjadi 9 orang pada tahun 2024. Secara angka kematian dari target 135/100.000 Kelahiran Hidup, realisasi tahun 2024 adalah 125/100.000 Kelahiran Hidup (KH). Target dari indikator kinerja ini adalah penurunan angka

kematian ibu, sehingga dapat dilihat dari tabel diatas, target kinerja AKI dapat dicapai.

Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan target Renstra adalah realisasi kinerja di bawah target renstra yaitu 125/100.000 KH dari target renstra yaitu 135/100.000 KH.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Untuk penurunan angka kematian ibu, sudah dilaksanakan berbagai Upaya melalui program-program dan kegiatan di semua bidang, termasuk dengan melakukan inovasi dalam pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat. Inovasi yang dilakukan adalah Pasan Mandeh (tahun 2022) dan Rang Pasisie (tahun 2023).

Berbagai upaya dilakukan dalam penurunan Angka Kematian Ibu diantaranya :

1. Memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dimana 2 kali diantaranya dengan pemeriksaan USG dan pemeriksaan 10 T.
2. Memastikan setiap ibu hamil mendapatkan edukasi dan konseling kehamilan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil yang diadakan minimal 4 kali dalam setahun di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan setiap ibu hamil telah memiliki buku KIA.
3. Memastikan semua bidan desa dikoordinatori oleh puksesmas untuk melaksanakan pemantauan wilayah setempat pada ibu hamil di wilayah kerjanya dan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang mengalami kondisi penyulit.
4. Peningkatan Kapasitas petugas dalam melakukan pelayanan ANC yg berkualitas dimana pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan Pelatihan Pelayanan Antenatal care, persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi Bidan lingkup Dinas kesehatan kabupaten Pesisir Selatan.

5. Adanya Kunjungan dokter spesialis Kebidanan dan Anak ke Puskesmas dalam rangka workshop pendampingan Puskesmas dalam kegawat darurat anak yang pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 kali di 5 puskesmas dimana dokter spesialis langsung memberikan bimtek kepada bidan di puskesmas dan wilayah kerja puskesmas terkait penanganan maternal dan neonatal.
6. Monitoring dan Evaluasi Program Kesga dalam rangka evaluasi program dan capaian.
7. Melakukan Audit Kematian Ibu dan Bayi jika ada kematian ibu atau bayi sebanyak dua kali dengan bedah kasus kematian ibu dan kematian bayi
8. Pemberian edukasi terkait penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting melalui inovasi PASAN MANDE di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah nagari dan stakeholder terkait.

e. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional

Target Angka Kematian ibu (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah 135/100.000 KH dengan Realisasi 125/100.000 KH. Untuk tahun 2024 target dan realisasi angka kematian ibu tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi karena Provinsi tidak mengeluarkan target maupun realisasi AKI , tapi untuk Tingkat Nasional , pada tahun 2024 ditarget menurunkan AKI menjadi 183/100.000 KH, untuk realisasi sampai LKj ini dibuat belum ada dirilis berapa realisasi AKI nasional.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Sumber: PMK No.214/PKK.02/2017

Indikator Angka Kematian Ibu ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 81.593.212,666,- dengan realisasi Rp. 77.559.329.306,- (95,06 %). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 107,41%, maka berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini sebesar 11,50%.

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indikator kinerja Angka Kematian Ibu

Indikator Angka Kematian Ibu ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
3. Penyelenggaraan SIK secara Terintegrasi
4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan PSM an Lintas Sektor Tingkat Daerah kabupaten/Kota

Anggaran Rp. 81.593.212,666,- dengan realisasi Rp. 77.559.329.306,- atau capaian 95,06 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan progam dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.033.883.360,- atau 4,94 %.

2. Indikator Angka Kamatian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan reproduksi. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kematian bayi yaitu; tingkat pendidikan ibu, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, kondisi ibu saat hamil, bersalin, dan perawatan bayi baru lahir. Untuk mengurangi tingkat kematian bayi dapat dilakukan dengan upaya-upaya seperti memastikan setiap ibu hamil dapat menjaga kesehatannya selama sebelum, pada saat dan pasca persalinan, menyediakan sanitasi yang layak dan aman, menyediakan akses air minum bersih, melakukan imunisasi.

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024

Pada tahun 2024, target Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 11/1.000 Kelahiran Hidup (KH) dengan realisasi kinerja adalah 10/1.000 KH, ini berarti bahwa Dinas Kesehatan sudah berhasil menekan angka kematian Bayi karena realisasinya di bawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. uk dalam kategori/ prediket ‘ **Sangat Baik**’.

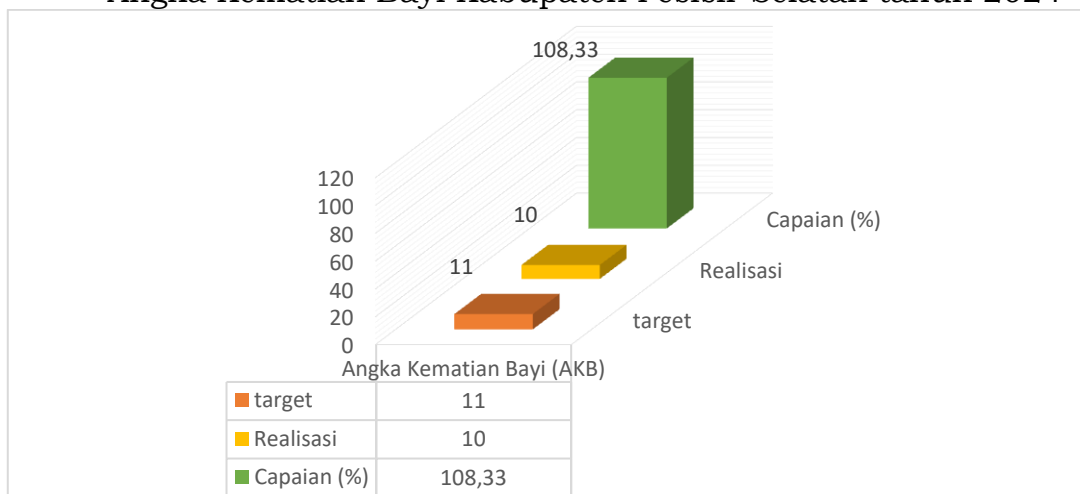
Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.8
Angka Kematian bayi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 KH	11	10	108,33

Selain pada tabel di atas, peningkatan kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan dalam menurunkan angka kematian bayi dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.6
 Angka Kematian Bayi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024



Formulasi Indikator angka kematian bayi :

$$\frac{\text{jumlah kematian bayi}}{\text{jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$$

Formulasi capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB)

$$\frac{(2 \times \text{Target AKB} - \text{realisasi})}{\text{Target AKB}} \times 100$$

Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Jumlah Kematian Bayi (AKB) Per Kecamatan per Puskesmas Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BAYI
1	2	3	18
1	Silaut	Tanjung Makmur	1
2	Lunang	Tanjung Beringin	5
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	4
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Ranah IV Hulu	6
5	Pancung Soal	Inderapura	2
6	Airpura	Airpura	1
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	3
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	6
9	Lengayang	Kambang	1
		Koto Baru	1
10	Sutera	Kayu Gadang	1
		Surantih	8
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	6
		IV Koto Mudik	3
12	IV Jurai	Salido	6
		Lumpo	7
13	Bayang	Pasar Baru	2
		Koto Berapak	6
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	1
15	Koto XI Tarusan	Tarusan	0
		BB Balantai	2
JUMLAH (KAB/KOTA)			72
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)			10,0
<i>Sumber: Badan Pusat Statistik</i>			

Data tabel diatas menunjukkan bahwa kematian bayi terbanyak terdapat di Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera yaitu 8 (delapan) orang, Lumpo Kecamatan IV Jurai sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian Ranah IV Hulu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir, Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas, Salido Kecamatan IV Jurai dan Koto Berapak Kecamatan Bayang masing-masing 6 (enam) orang.

Dari 72 bayi yang meninggal, penyebabnya antara lain BBLR, Asfiksia, pneumonia, Kelainan Bawaan, dan lainnya.

b. Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian Indikator AKB ini termasuk dalam kategori/ prediket **‘Sangat Baik’**. Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 s/d 2024 adalah sebagai berikut :

Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2024 yaitu 10 per 1.000 kelahiran Hidup (KH) dari target 11/1.000 KH. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu 11/1.000 KH dari target ABK 12/1.000 KH, sementara pada tahun 2022 target untuk AKB adalah 10/1.000 KH namun realisasinya diatas target yaitu 12/1.000 KH.

Tabel 3.8
Angka Kematian Bayi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022 s/d 2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Target	10	12	11
2	Realisasi	12	11	10
3	Capaian	87,50%	108,33%	109,09%

Selain data tabel diatas, penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 s/d 2024 tersebut dapat di lihat pada grafik 3.4 di bawah ini :

Grafik 3.4



c. Membandingkan Antara Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2024

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target Renstra dapat di lihat pada tabel 3.3,10. di bawah ini :

Tabel 3.3.10

Perbandingan antara Realsasi PK dengan target Renstra

Indikator Kinerja	2024	
	Realisasi Kinerja	Target Renstra
Angka Kematian Bayi (AKB)	10/1.000 KH	11/1.000 KH

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja dinas kesehatan tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra menggambarkan pencapaian kinerja yang sangat baik karena bisa menurunkan angka kematian dari target Renstra 11/1.000 KH menjadi 10/1.000 KH.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berbagai upaya dilakukan dalam penurunan angka kematian bayi diantaranya :

1. Memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dimana 2 kali diantaranya dengan pemeriksaan USG dan pemeriksaan 10 T.
2. Memastikan setiap ibu hamil mendapatkan edukasi dan konseling kehamilan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil yang diadakan minimal 4 kali dalam setahun di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan setiap ibu hamil telah memiliki buku KIA.
3. Memastikan setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu mendapatkan inisiasi menyusui dini, mendapatkan pemeriksaan 3 kali selama umur 0-2 hari, memberikan imunisasi Hb0, memberikan injeksi vitka infant, memberikan salep mata kloramfenikol serta memeriksa kondisi bayi baru lahir secara umum (KU).
4. Memastikan setiap ibu hamil mendapatkan edukasi dan konseling kehamilan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita mendapatkan edukasi dan konseling serta mengikuti kelas ibu balita yang diadakan minimal 4 kali dalam setahun di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan setiap ibu hamil telah memiliki buku KIA
5. Memastikan semua bidan desa dikoordinatori oleh puksesmas untuk melaksanakan pemantauan wilayah setempat pada ibu hamil dan bayi baru lahir di wilayah kerjanya dan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil dan bayi baru lahir yang mengalami kondisi penyulit.
6. Peningkatan Kapasitas petugas dalam melakukan pelayanan ANC yg berkualitas dimana pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan Pelatihan Pelayanan Antenatal care, persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi Bidan lingkup Dinas kesehatan kabupaten Pesisir Selatan.
7. Adanya Kunjungan dokter spesialis Kebidanan dan Anak ke Puskesmas dalam rangka workshop pendampingan Puskesmas dalam kegawat darurat anak yang pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 kali di 5 puskesmas dimana dokter spesialis langsung memberikan

bimtek kepada bidan di puskesmas dan wilayah kerja puskesmas terkait penanganan maternal dan neonatal.

8. Monitoring dan Evaluasi Program Kesga
9. Melakukan Audit Kematian Ibu dan Bayi jika ada kematian ibu atau bayi.
10. Pemberian edukasi terkait penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting melalui inovasi PASAN MANDE di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah nagari dan stakeholder terkait.

Kebijakan teknis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi adalah :

1. Menyediakan rumah tunggu kelahiran dan menyediakan konsumsi bagi pendamping pasien yang berdomisili jauh dari RSUD M. Zein Painan.
2. Menyediakan biaya transportasi bagi pasien yang akan dirujuk ke pelayanan yang lebih tinggi / ke M. Djamil Padang.
3. Mengadakan Audit Maternal Perinatal (AMP) berkoordinasi dengan dokter spesialis obgyn dan spesialis anak RSUD M. Zein Painan yang dilaksanakan per enam bulan terhadap kasus kematian ibu dan kematian bayi.
4. Pelatihan Blended Learning Dokter dan Bidan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Meningkatkan universal access dan coverage untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana.
6. Pelayanan Antenatal yang sesuai dengan standar
7. Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas sebanyak 4 kali dalam setahun.
8. Melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil resiko tinggi yang dilaksanakan oleh tenaga Puskesmas.

9. mengaktifkan Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada masing-masing nagari Siaga
10. Mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan di fasyankes.
11. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) di Rumah sakit dan PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar) di Puskesmas.
12. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan : Bidan, perawat, dokter, dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen)
13. Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan : Obat dan bahan medis habis pakai, sarana/alat PONEK dan PONEK.
14. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes / Polindes, Pustu (Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit)
15. Memberdayakan keluarga dan masyarakat tentang Kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak..
16. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas
17. Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Perguruan tinggi dan swasta dalam peningkatan edukasi di masyarakat.
18. Memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar dan dilakukan Pemantauan Wilayah Setempat oleh Bidan dan petugas kesehatan lainnya.
19. Memastikan setiap ibu hamil yang beresiko dilakukan kunjungan oleh bidan setempat
20. Peningkatan Kapasitas petugas dalam melakukan pelayanan ANC yang berkualitas
21. Adanya Kunjungan dokter spesialis Kebidanan dan Anak ke Puskesmas dalam rangka workshop pendampingan Puskesmas dalam kegawat darurat anak

22. Monitoring dan Evaluasi Program Kesga

23. Melakukan Audit Kematian Ibu dan Bayi jika ada kematian ibu atau bayi.

24. Pemberian edukasi terkait penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting melalui inovasi PASAN MANDE di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah nagari dan stakeholder terkait

e. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional

Realisasi Angka kematian Bayi (AKB) kabupaten pesisir Selatan dapat dilakukan penurunan yaitu 10/1.000 KH, namun tidak bisa membandingkan dengan AKB Provinsi karena tidak ada mengeluarkan Angka Kematian Bayi tahun 2024, untuk nasional belum ada rilis Angka kematian Bayi 2024, namun sejalan Dengan Progres AKI, angka kematian bayi AKB Di Indonesia Juga Mengalami Penurunan Dari 26 Per 1.000 Kelahiran Hidup Pada Tahun 2010 Hasil SP2010 Menjadi 16,85 Per 1.000 Kelahiran Hidup Pada Tahun 2020 Hasil SP2020 BPS, 2023. Meskipun Demikian, Untuk Mencapai Target 3.2 Pada Sdgs, Pelayanan Kesehatan Untuk Anak Dan Pengurangan Risiko Penyebab kematian bayi Juga Perlu Terus Ditingkatkan. kematian Ibu Membawa Dampak Jangka Panjang Pada Anak Yang Ditinggalkannya. Penelitian Menunjukkan Jika kematian Ibu Dapat Berdampak Pada Malnutrisi Serta Rendahnya Capaian Pendidikan Anak Yang Ditinggalkan National Research Council, 2020.

Begitu Juga Dengan Tingkat Kesehatan Ibu, Khususnya Gizi Pada Ibu Hamil Dan Menyusui Juga Sangat Mempengaruhi Kesehatan Anak. Ibu Dengan Kondisi Kurang Gizi Selama Hamil Berakibat Pada 13 Persen Kelahiran Dengan Berat Badan Lahir Rendah BBLR Selama Sepuluh Tahun Terakhir Di Indonesia UNICEF, 2020. Penelitian Juga Menyebutkan Jika Masalah Gizi Pada Ibu Berkontribusi Terhadap Keterbatasan Pertumbuhan bayi, Yang Dapat Meningkatkan Risiko kematian Neonatal Dan Kejadian Stunting Pada Usia Dua Tahun.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

Efisiensi =	(Pagu anggaran keluaranxcapaian keluaran)-Realisasi Anggaran Keluaran	x	100%
	Pagu Anggaranx Capaian Keluaran		

Indikator Angka Kematian Ibu ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 81.593.212,666,- dengan realisasi Rp. 77.559.329.306,- atau capaian 95,06 %. Capaian kinerja indikator ini adalah 109,09%.

Berdasarkan rumus dan data anggaran, realisasi dan capaian kinerja, maka efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 12,25 %.

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indicator kinerja Angka Kematian Bayi

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan Kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota
- Penyelenggaraan SIK secara Terintegrasi
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan PSM an Lintas Sektor Tingkat Daerah kabupaten/Kota

Total anggaran untuk menunjang indikator ini adalah Rp.81.593.212.666,- dan realisasi Rp. 77.559.329.306,- (95,06%). Efisiensi anggaran pada program ini adalah Rp.4.033.883.360,- (4,94%).

3. **Prevalensi Stunting**

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya akibat dari kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan faktor lingkungan. Prevalensi stunting mencerminkan keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu disebuah daerah. Stunting pada anak-anak disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis dan penyakit berulang yang berkaitan dengan latar belakang sosial dan ekonomi buruk.

Gejala dan dampak stunting meliputi tinggi badan anak lebih pendek dari standar usia, resiko penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung koroner, gangguan perkembangan otak, kekebalan tubuh melemah dan kesulitan belajar.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja prevalensi stunting adalah:

$$PAB(2)SPstunting = \frac{JPKKJAB(2)SP\ stunting}{JAB(2)} \times 100\%$$

PAB(2)Pstunting : prevalensi anak baduta pendek stunting

JAB(2) : Jumlah anak baduta sangat pendek

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024

Target prevalensi stunting tahun 2024 adalah 7 %, dan realisasinya adalah di bawah target yaitu 6,56 %. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan karena dapat menurunkan angka prevalensi Stunting pada tahun 2024 di bawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pencapaian Kinerja dalam hal target ini adalah semakin menurun realisasinya semakin baik kinerja.

Target dan realisasi prevalensi Stunting tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 3.3.12 di bawah ini :

Tabel 3.3.12
Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Target	Realiasi	Capaian
1	Prevalens Stunting	7	6,56	106,29

Peningkatan Kinerja Dinas Kesehatan Dalam penurunan angka Prevalensi Stunting juga bisa digambarkan dengan grafik 3.8 berikut ini :

Grafik 3.8
Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan



b. Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Angka prevalensi stunting menurut pengukuran langsung (EPPGBM) tahun 2024 adalah 6,56% menurun dibandingkan tahun 2023. Angka prevalensi stunting adalah Tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 7 %. Prevalensi stunting menurut pengukuran melalui aplikasi Sigizi (EPPGBM) tahun 2024 adalah 6,56 % menurun sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 7 %.

Capaian prevalensi stunting dapat dari tahun 2022 s/d 2024 dapat di lihat pada tabel 3.3.14 di bawah ini :

Tabel 3.3.14
Prevalensi Stunting kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 s/d 2024

Prevalensi Stunting	2022	2023	2024
Target	10,92	11,2	7
Realisasi	7	7	6
Capaian	93,97	135,90	137,50

Perbandingan Capaian Prevalensi Stunting Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2022 s/d 2024 yang menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik juga dapat digambarkan pada grafik 3.10 di bawah ini

Grafik 3.10



c. Membandingkan Antara Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2024

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target Renstra dapat di lihat pada tabel 3.3,13. di bawah ini :

Tabel 3.3.13
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target Renstra

Indikator Kinerja	2024	
	Realisasi Kinerja	Target Renstra
Prevalensi Stunting	6,56%	10,60%

Dari tabel diatas dapat di lihat, bahwa realisasi kinerja prevalensi stunting dibandingkan dengan target Renstra dapat dicapai dengan sangat baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Untuk target prevalensi Stunting tahun 2024 berbeda dengan target Renstra dengan target Perjanjian Kinerja, dimana target Renstra adalah 10,60 % sedangkan target Perjanjian Kinerja sebesar 7%. Target ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Kesehatan berdasarkan Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu 7%. Penetapan target tahun 2024 tidak mungkin diberikan lebih tinggi dari realisasi/capaian kinerja tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan kinerja sehingga bisa menurunkan angka prevalensi stunting Kabupaten Pesisir Selatan.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional

Angka prevalensi stunting didapatkan dari hasil surveilans gizi pada balita usia 0-59 bulan (balita) di daerah tertentu pada waktu tertentu. Pengukuran prevalensi stunting dilakukan dalam dua metoda yaitu pertama melalui pengukuran rutin balita setiap bulannya yang dimasukkan dalam aplikasi Sigizi menu E-PPBGM oleh petugas kesehatan di puskesmas berdasarkan hasil penimbangan balita di posyandu; yang kedua adalah melalui pelaksanaan Survey Nasional yang dilaksanakan satu kali dalam setahun melalui pengukuran balita sampel berdasarkan metoda survey yang dilakukan oleh petugas survey.

Prevalensi stunting menurut pengukuran melalui aplikasi Sigizi (EPPGBM) tahun 2024 adalah 6,56 % menurun sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 7 %.

Sedangkan prevalensi stunting Kabupaten Pesisir Selatan menurut hasil survey Nasional yang bernama Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023 yang hasilnya dirilis pada awal tahun 2024 adalah sebesar 27 %. Angka ini lebih rendah 2,8 poin dari hasil survey sebelumnya pada tahun 2022 melalui survey nasional Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yaitu sebesar 29,8 %. Angka prevalensi stunting survey nasional tahun 2024 yang bernama Survey status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 belum dapat ditampilkan karena pelaksanaannya dilakukan pada akhir tahun 2024 dan masih berlanjut sampai awal tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Untuk percepatan penurunan prevalensi stunting telah diatur dengan Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana seluruh stake holder terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting dalam 8 aksi konvergensi dan 5 RAN pasti. Dinas Kesehatan mengambil peran dalam aksi 7 yaitu pengukuran dan publikasi, serta pelaksanaan intervensi spesifik penanganan stunting.

Penurunan angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yaitu :

1. Melakukan pemantauan asupan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui secara teratur.
2. Pemberian makanan tambahan bergizi pada ibu hamil dan ibu menyusui
3. Pemberian mikro nutrien pada ibu hamil dan ibu menyusui berupa pemberian tablet tambah darah, vitamin A pada ibu nifas.
4. Melakukan pemantauan asupan gizi pada bayi dan balita secara teratur
5. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi sampai umur 6 bulan.
6. Pemberian MP ASI yang bergizi pada balita.
7. Pemberian mikro nutrien pada bayi dan balita berupa vitamin A, pemberian obat cacing.
8. Pemberian imunisasi pada bayi dan balita

9. Menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan antara lain dengan menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, yodium yang cukup.
10. Melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu :- Setiap bulan ketika anak anda berusia 0 sampai 12 bulan-
Setiap 3 bulan ketika anak anda berusia 1 sampai 3 tahun - setiap 6 bulan ketika anak anda berusia 3 sampai 6 tahun
11. Pemberian edukasi terkait penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah nagari dan stakeholder terkait

Selain hal tersebut di atas, kebijakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting adalah :

1. Pelaksanaan surveilans dan pemantauan asupan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi serta balita.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sesuai standar berdasarkan siklus hidup di puskesmas dan jaringannya
3. Pelaksanaan intervensi spesifik pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita berupa pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, pemberian vitamin A pada ibu nifas, bayi dan balita, pemberian obat cacing pada balita, pemberian IMD pada bayi baru lahir dan ASI Eksklusif pada bayi sampai 6 bulan, pemberian imunisasi pada bayi dan balita, pemberian MP ASI pada balita, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, ibu menyusui serta balita.
4. Pelaksanaan pengukuran dan penimbangan pada ibu hamil, bayi dan balita secara rutin setiap bulannya untuk mengetahui status gizinya dan pemberian edukasi serta penanganan lebih lanjut.
5. Pemberian makanan tambahan pangan lokal pada ibu hamil dan balita kurang gizi
6. Penatalaksanaan gizi kurang dan gizi buruk pada puskesmas sampai kepada tingkat lanjut.

7. Pemberian makan bagi pendamping pasien gizi buruk di rumah sakit
8. Pemberian edukasi terkait penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting melalui inovasi PASAN MANDE di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah nagari dan stakeholder terkait

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

Efisiensi =	$\frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}}$	x	100%
-------------	---	---	------

Sumber: PMK No.214/PKK.02/2017

Indikator Prevalensi Stunting ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 81.593.212,666,- dengan realisasi Rp. 77.559.329.306,- atau capaian 95,06 %. Capaian kinerja indikator ini adalah 137,50%. Maka berdasarkan rumus dan data anggaran, realisasi anggaran serta capaian kinerja, maka angka untuk efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah 10,57%.

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indikator kinerja Prevalensi Stunting

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) serta Prevalensi Stunting adalah adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Pereorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan Kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota
- Penyelenggaraan SIK secara Terintegrasi
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan PSM an Lintas Sektor Tingkat Daerah kabupaten/Kota

Total anggaran untuk menunjang indikator ini adalah Rp.81.774.170.666,- dan realisasi Rp. 77.721.069.556, (95,04%). Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.053.101.110,- (4,97%).

Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
-----------	--------------------------------------

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan.**

Inovasi daerah sebagai **bentuk pembaharuan dan solusi kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah** guna memecahkan berbagai masalah dan memanfaatkan peluang yang ada di berbagai daerah.

Formula untuk menghitung capaian kinerja indikator ini adalah : “**Hasil penilaian saat pengentrian inovasi pada aplikasi IGA**”

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2024

Tahun 2024, Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan tidak mengeluarkan inovasi baru, hanya memasukan nilai inovasi tahun 2023 yaitu 91 % dari target 100 % dengan capai 91 %. Nilai capaian inovasi tidak 100 % karena ada dokumen yang tidak diinputkan dalam aplikasi penilaian inovasi, sehingga nilainya hanya 91 %.

Target dan realisasi inovasi tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 3.3.15 berikut ini :

Tabel 3.3.15
Target dan realisasi Inovasi Dinas Kesehatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	2024		
			Target PK	Realisasi PK	Capaian PK
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	%	100	100	91	91,00

Formulasi capaian indikator Persentase Inovasi Dinas Kesehatan

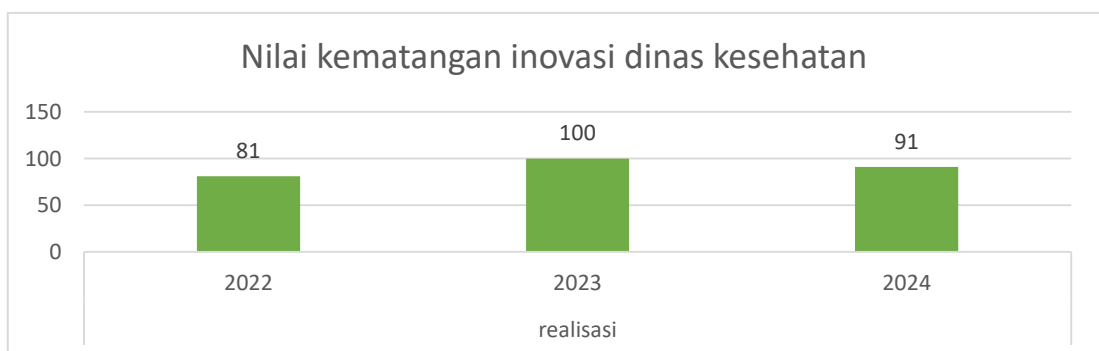
$$\frac{\text{Realisasi indikator}}{\text{Target indikator}} \times 100$$

Inovasi dapat dijadikan sebagai pola pemecahan masalah, dukungan kebijakan kepala daerah, evaluasi komitmen kinerja inovasi, komunikasi dan koordinasi, marketing, menggalakkan kompetisi.

b. Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Nilai kematangan inovasi Dinas Kesehatan pada tahun 2024 adalah 91 %, menurun dari tahun 2023 yang nilai kematangan inovasi adalah 100 %, sementara pada tahun 2022 nilai kematangan inovasi dinas kesehatan adalah 81%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.11



c. Membandingkan Antara Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2024

Perbandingan realisasi Kinerja tahun 2024 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.3.16. di bawah ini :

Tabel 3.3.16
Perbandingan realisasi Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	2024	
	Realisasi Kinerja	Target Renstra
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	91	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian indikator ini adalah 91 %, tidak terealisasi 100% sesuai target Renstra karena ada indikator yang tidak diinputkan pada aplikasi (IGA) penilaian inovasi daerah tahun 2023. Tahun 2024, Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan inovasi baru.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional

Realisasi kinerja nilai kematangan inovasi tidak ada perbandingan dengan realisasi nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Adapun nilai kematangan inovasi Dinas Kesehatan yang hanya 91 % disebabkan karena kekurangan dokumen yang diinputkan di aplikasi penilaian inovasi yaitu aplikasi “IGA”.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Program dan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 2.298.160.485 , realisasi Rp. 1.866.003.481,- atau 81,20 %.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

Efisiensi =	(Pagu anggaran keluaran x capaian keluaran) - Realisasi Anggaran Keluaran	x	100%
	Pagu Anggaran Capaian Keluaran		

Sumber: PMK No.214/PPK.02/2017

Capaian kinerja indikator ini adalah 91%. Maka berdasarkan rumus dan data anggaran, realisasi anggaran serta capaian kinerja, maka angka untuk efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah 10,77%.

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indikator kinerja Inovasi Daerah

Program dan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat
2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah
4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang
6. kegiatan penataan organisasi

Total anggaran adalah Rp. 2.298.160.485 , realisasi Rp. 1.866.003.481,- atau 81,20 %. Efisiensi untuk program ini sebesar Rp. 432.157.004,- (18,80%).

3.4 Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan realisasi APBD secara fisik mencapai 98,48% dan realisasi keuangan mencapai 92,40%.

Untuk mencapai sasaran strategis ditunjang dengan beberapa program berikut ini :

Tabel 3.4.1
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Yang Menunjang Sasaran Strategis
 Dinas Kesehatan Tahun 2024

		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	223.383.337.234	206.042.154.247	92,24
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.666.818.165	100.727.217.921	92,69
II	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112.617.191.729	103.891.734.266	92,25
III		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.268.527.540	1.087.251.260	85,71
IV		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	372.331.000	174.210.550	46,79
V	3. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	458.468.800	161.740.250	35,28

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, semua sasaran mempunyai capaian 5 (lima) indikator-indikator kinerja dengan capaian dari 91% sampai 109,09 % sehingga memiliki prediket **“Sangat Baik”**. Ketiga sasaran tersebut adalah Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja dengan capaian sebesar 103,19 %, Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat dengan rata2 capaian 107,59% (tiga indikator).

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan, semua indikator kinerja yang memiliki capaian berkisar antara 91,00% sampai dengan 197,09%, sedangkan indikator kinerja yang memiliki capaian paling rendah adalah Nilai Kematangan Inovasi dinas Kesehatan sebesar 91%

3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang menunjang sasaran strategis tahun 2024 adalah sebesar 92,24 % dari anggaran Rp. 223.383.337.234 ,- dengan realisasi Rp.206.042.154.247,- yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non fisik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini disusun berdasarkan capaian 5 (lima) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)) serta realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun anggaran 2024.

Pada tahun 2024 realisasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik, karena dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ada 3 indikator yang melebihi target, ada 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat diturunkan dari tahun 2023 yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta Prevalensi Stunting. Untuk realisasi anggaran pada tahun 2024 anggaran pendukung PK yang terealisasi sebanyak 92.24%.

4.2 **Saran**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan maka dilakukan upaya-upaya, antara lainnya :

1. Dalam Rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain :
 - a. Intervensi prioritas untuk mengatasi penyebab utama Kematian Ibu dan bayi.
 - b. Mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan di fasyankes.
 - c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar).
 - d. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan : Tenaga Nusantara Sehat, perawat, dokter Internsif (Dokter dengan Kewenangan tambahan), dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospistal).
 - e. Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Sarana Prasarana Kesehatan.
 - f. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Pustu (Puskesmas Pembantu), Puskesmas dan Rumah Sakit.
 - g. Memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.

- h. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik .
- 2. Mencapai Nilai AKIP Dinas Kesehatan sesuai dengan target perlu komitmen yang serius dari seluruh jajaran Dinas Kesehatan dengan meningkatkan kualitas Kinerja dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kesehatan.